

Pengaruh Institusi terhadap Kebijakan Pembangunan Ekonomi

- ◆ Mengapa negara tertentu berhasil membuat kebijakan ekonomi yg bisa meningkatkan pertumbuhan, sedangkan negara-negara lain tidak?
 - ◆ Sebagian pemerintah berhasil menyediakan barang publik yg diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan, sedangkan pemerintah di negara yg lain justru lebih menyediakan barang privat yg tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat?
 - ◆ Mengapa sebagian negara berhasil membuat komitmen kebijakan pembangunan berjangka-panjang sedangkan negara-negara yang lain tidak?
- Masalahnya terletak pada institusi demokratis di setiap negara yang berfungsi secara berlain-lainan.

Institusi: Principal-Agent Relationships

1. Rakyat yang berdaulat mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada lembaga legislatif dan eksekutif.
2. Delegasi kepada proses pembuatan kebijakan dalam kabinet, lembaga-lembaga negara, dengan mekanisme kontrol yang memadai (sistem kawal dan imbang, *checks and balances*)
3. Lembaga legislatif dan eksekutif mendelegasikan pelaksanaan peraturan kepada lembaga, instansi, dan satuan-satuan dalam organisasi pemerintahan di pusat maupun daerah.

Dua azas Keseimbangan: Menuntut Adanya *trade-off* (Cox & McCubbins, 2001)

- ◆ Ketegasan (*Decisiveness*); Kemampuan negara untuk menetapkan dan melaksanakan perubahan kebijakan.
 - ◆ Kemantapan (*Resoluteness*); Kemampuan negara untuk meneruskan sebuah kebijakan yang telah digariskan.
- Ketika jumlah pihak yang memiliki veto efektif semakin banyak, maka proses pembuatan keputusan akan semakin mantap (*resolute*), tetapi mungkin akan menjadi kurang tegas (*decisive*).

Tiga Kemungkinan dlm Kebijakan Pembangunan

1. *Ungovernability*: negara tidak mampu membuat kebijakan yang jelas (*indecisive*)
 2. *Irresoluteness*: negara tidak bisa menunjukkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.
 3. *Balkanization*: begitu banyak kebijakan yang dibuat oleh beragam kepentingan dan “sub-pemerintah” yang berlain-lainan.
- * Apakah kebijakan pembangunan Indonesia memiliki ciri-ciri di atas? Bagaimana cara untuk memperbaikinya?

KESIMPULAN

1. Ketika heterogenitas dalam masyarakat meningkat, sistem dengan banyak pihak yang memegang veto efektif akan meningkatkan risiko adanya kemacetan dan kebuntuan (*stalemate & gridlock*), meningkatkan biaya untuk perumusan kebijakan.
 2. Demikian juga, ketika heterogenitas dalam masyarakat meningkat, terlalu sedikitnya pihak yang memegang veto efektif akan meningkatkan risiko ketidakadilan dan rendahnya keterwakilan (*inequality and under-representation*).
- * Semua kemungkinan di atas membutuhkan adanya pertukaran kelembagaan (*institutional trade-offs*).